

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja merupakan salah satu agenda reformasi keuangan negara yang mengarah pada orientasi penggunaan dana pemerintah pada output. Perubahan ini penting dalam proses pembelajaran untuk menggunakan sumber daya pemerintah yang semakin terbatas tetapi tetap dapat memenuhi kebutuhan yang semakin tinggi. Penganggaran yang berorientasi pada output merupakan praktek yang dianut oleh pemerintah modern di berbagai negara. Pendekatan anggaran yang demikian sangat diperlukan bagi satuan kinerja instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (Safitri, 2022).

Pemerintah sebagai akuntansi sektor publik memiliki perencanaan dan pelaksana anggaran pada sektor publik dituntut untuk memenuhi asas akuntabilitas yang artinya tanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran kecurangan atau harus memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah wajib mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat. Selain akuntabilitas pelaku anggaran sektor publik harus memenuhi asas transparansi dimana pemerintah daerah dapat menyajikan segala informasi kepada masyarakat secara terbuka dan sebenar-benarnya agar dapat dimengerti dan dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Putra, 2018).

Anggaran merupakan suatu pernyataan yang merinci estimasi kinerja untuk dicapai selama periode tertentu dan ditunjukkan dalam bentuk finansial (Merawati, 2019). Sedangkan menurut (Ratag et al., 2019) mendefinisikan bahwa Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Oleh karena itu anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tercapainya anggaran yang baik tidak terlepas dari pengawasan dalam penyusunan maupun penggunaan anggaran. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi.

Terutama dalam menggunakan belanja, khususnya belanja langsung sering terjadi penggunaan anggaran yang tidak sesuai sehingga tujuan tidak tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif yang manfaat atau output dari pelayanan publik sulit dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu media pertanggungjawaban kepala daerah adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Palembang Tahun 2022 dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), serta memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Pemerintah Kota Palembang Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Palembang dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja pada Tahun 2022 sebagai tahun keempat dalam RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Palembang Tahun 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan (LKJIP, 2023).

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan merupakan dinas yang bekerja dibidang pengairan. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, baik yang alami maupun yang diusahakan oleh manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 11 tahun 1974 tentang pengairan. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan memiliki 7 (tujuh) unit kerja yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Rekayasa Teknik, Bagian Konstruksi, Bagian Operasi dan Pemeliharaan, dan Bagian Bina Manfaat. Setiap unit memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang telah diatur sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan saat ini memiliki pelayanan pengaduan atau keluhan. Dengan adanya layanan tersebut Masyarakat dapat menyampaikan tentang apa yang menjadi kendala atau kerusakan dilingkungan sekitar. (PSDA, 2023).

Fenomena pada kinerja anggaran provinsi Sumatera Selatan yang terjadi saat ini, berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala bidang keuangan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah Sumatera Selatan juga mengalami beberapa kendala seperti sulitnya masyarakat dalam menyampaikan keluhan masyarakat. Penyerapan anggaran merupakan salah satu topik yang kerap diperbincangkan saat mendekati akhir tahun anggaran. Hal ini disebabkan karena tingkat penyerapan anggaran belanja daerah yang rendah pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan. Berikut data laporan anggaran belanja daerah Sumatera selatan selama tiga tahun terakhir.

**Tabel 1. 1 Laporan Anggaran Belanja Dinas PSDA
Prov.Sumsel Tahun 2021-2023**

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Persentase
2021	164.320.324.763,00	139.659.575.624,00	84,99%
2022	104.963.519.449,00	94.714.414.596,00	90,24%
2023	100.254.930.000,00	81.817.921.810,00	81,61%
Rata – Rata			85,61%

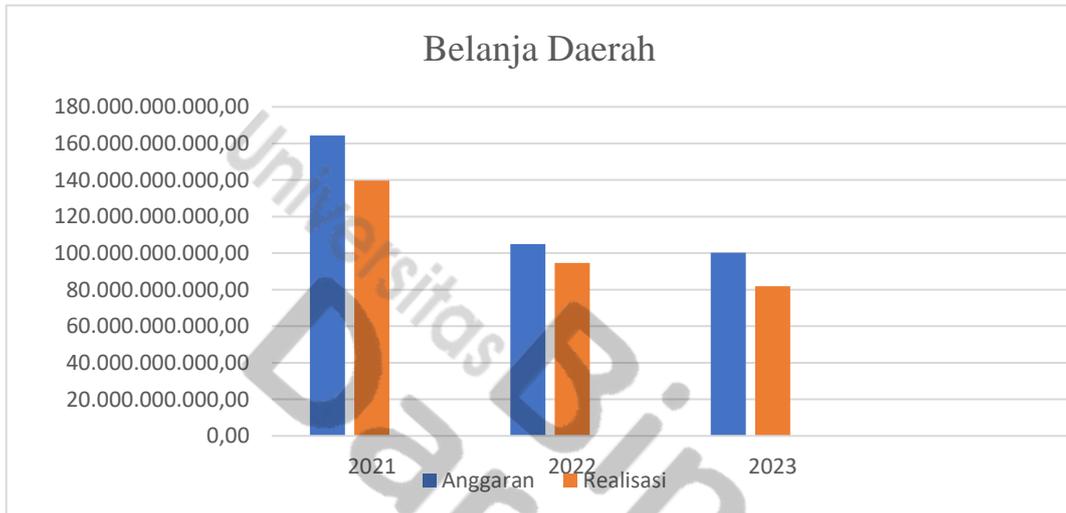
Sumber: PSDA Sumatera Selatan (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah sumatera selatan dari tahun 2021-2023 pemerintah provinsi sumatera selatan menyajikan realisasi belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp94.714.414.596,00 atau 90,24% dari anggaran belanja daerah sebesar Rp 104.963.519.449,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp44.945.161.028,00 atau 47,45% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp139.659.575.624,00 sedangkan realisasi belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp81.817.921.810,00 atau 81,61% dari anggaran belanja daerah sebesar Rp100.254.930.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp12.896.492.786,00 atau 8,63% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp94.714.414.596,00 (CALK, 2021-2023).

Tingkat penyerapan anggaran pada Dinas PSDA provinsi sumatera selatan mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif) dengan nilai rata-rata sebesar 85,61%. Padahal jika ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158, kinerja penganggaran dinilai baik apabila kementerian negara/lembaga

memiliki persentase penyerapan anggaran paling sedikit sebesar 95% dengan demikian anggaran belanja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi Sumatera selatan masih kurang baik.

Grafik 1.1 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2021-2023



Dampak dari penyerapan anggaran yang rendah tersebut dikarenakan akselerasi penurunan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera selatan. Selain itu, adanya kegagalan target pada penyerapan anggaran, akan berakibat pada hilangnya manfaat belanja serta memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, karena program yang telah direncanakan pemerintah provinsi Sumatera selatan menjadi terhambat, seperti program pembangunan daerah, program penanggulangan kemiskinan, serta program investasi dan pengembangan usaha. Akibat lain dari anggaran yang kurang optimal akan menurunkan jumlah lapangan kerja yang menyebabkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Oleh karena itu, pengukuran kinerja terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pengelolaan APBD tersebut sudah dilakukan dengan baik. Selain itu, dengan adanya pengukuran kinerja tersebut, dapat dijadikan sebagai evaluasi dan tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode selanjutnya (Zuhri & Soleh, 2016).

Kinerja anggaran berkonsep *value for money* adalah sistem penganggaran yang mementingkan upaya untuk mencapai produk kerja atau hasil dari biaya yang direncanakan atau alokasi input (Arifani et al., 2018). Konsep ini digunakan untuk menilai kerja pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki,

sehingga belanja dapat dilakukan secara maksimal. Pencapaian konsep *value for money* digambarkan dengan tiga E, yaitu (Khusaini & Nurkholis, 2019), yaitu (1) Ekonomi (*Input*) yaitu meminimalkan biaya sumber daya suatu kegiatan atau program; (2) Efisien (*Output*) yaitu pencapaian dengan usaha yang optimal dengan input tertentu; dan (3) Efektivitas (*Outcome*) yaitu tingkat pencapaian dari kegiatan atau program yang ditetapkan. Dengan demikian, kinerja anggaran berkonsep *value for money* dapat tercapai apabila pemerintah menetapkan biaya input yang kecil untuk mencapai *output* yang optimal dalam mencapai *outcome* dari sebuah tujuan (Saraswati & Suhartini, 2022).

Ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value of money*. Faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran berkonsep *value for money* tersebut antara lain, yaitu akuntabilitas, partisipasi, pengawasan dan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Keempat faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran tersebut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hubungan pengalokasian anggaran dengan target kinerja, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, dan meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan kegiatan, termasuk pengelolaan anggarannya (Batubara & Risna, 2020).

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dan telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Wahyuni, 2019). Akuntabilitas merupakan hal penting dalam menjamin efisiensi dan efektivitas (Firmansyah et al., 2018). Semakin baik akuntabilitas yang diterapkan semakin baik kinerja anggaran yang dikelola (Purnomo & Putri, 2018). Tujuan awal reformasi sektor publik adalah terwujudnya penerapan akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah, lembaga sektor publik dituntut untuk menekankan tanggungjawab secara horizontal (*horizontal accountability*), sehingga tidak hanya pada tanggungjawab secara vertikal (*vertical accountability*). Dengan demikian, seseorang atau organisasi berhak mendapatkan keterangan tentang bisnis atau kinerja dalam menjalankan tugas untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama (Novianti, 2019). Partisipasi adalah keikutsertaan individu yang secara emosional dan mental dalam kondisi organisasi demi tercapainya cita-cita bersama serta melaksanakan pertanggungjawaban secara bersama-sama. Keikutsertaan yang dilaksanakan seseorang tidak hanya kegiatan secara fisik namun juga melibatkan psikologis, yakni sebesar apa dampak yang diberikan seseorang dalam memengaruhi pengambilan keputusan (Andriani, 2018). Dengan demikian, Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Siregar, 2015). Pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan (Pertwi, 2015). Dengan demikian, mengukur kinerja dapat memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan dan aturan yang telah ditetapkan.

Komitmen organisasi adalah seseorang yang merasa terlibat dalam kegiatan organisasi dan bersedia untuk meningkatkan diri dan menunjukkan loyalitas kepada organisasi (Gunawan & Wibowo, 2020). Keinginan untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, dan keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Menurut (Kaswan, 2017) komitmen organisasi merupakan ukuran kesediaan karyawan untuk bertahan dengan sebuah perusahaan di waktu yang akan datang. Komitmen kerap kali mencerminkan kepercayaan karyawan terhadap misi dan tujuan organisasi, kesediaan melakukan usaha dalam menyelesaikan pekerjaan dan hasrat untuk terus

bekerja disana. Dengan demikian, perpaduan antara sikap dan perilaku yang dibangun atas dasar kepercayaan dan rasa memiliki yang diwujudkan dalam keinginan yang kuat untuk tetap berada dalam organisasi dan mencapai tujuan organisasi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Saraswati & Suhartini, 2022), dengan persamaan variabel penelitian yaitu akuntabilitas dan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Sedangkan perbedaannya mengacu pada penelitian (Batubara & Risna, 2020) antara lain, pertama menambah variabel partisipasi karena partisipasi merupakan penjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Instrumen dasar partisipasi adalah pengaturan yang menjamin hak untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan menurut (Andriani, 2018) Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu.

Kedua, menambah variabel pengawasan karena dengan adanya pengawasan semua aktivitas pemerintahan melalui pemeriksaan secara menyeluruh dimaksudkan agar seluruh aktivitas yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Setiyanningrum & Isroah, 2017). Pengawasan merupakan bagian penting terhadap jalannya pemerintahan atas aktivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan karena pengelolaan keuangan berkaitan dengan proses penyusunan anggaran, pelaksanaan program sampai dengan tahap pelaporan. Apabila dalam proses pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan kegiatan ditemukan adanya penyimpangan maka penyimpangan tersebut akan segera dikoreksi maupun ditindaklanjuti (Aprianti & Riharjo, 2017).

Objek penelitian yaitu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan laporan anggaran belanja daerah untuk periode 2021-2023 juga menunjukkan bahwa persentase antara realisasi dengan anggaran yang dianggarkan mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Permasalahan lain yang sedang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan yakni terbatasnya pemahaman aparatur terhadap teknis penyusunan anggaran dan teknis pengalokasian dana terutama dalam penentuan prioritas belanja dengan mengacu pada prinsip anggaran berbasis kinerja sebagai dasar penyusunan

anggaran. Dengan demikian alasan saya memilih judul ini dikarenakan untuk mengetahui bagaimana tingkat penyerapan anggaran yang di realisasikan dengan yang dianggarkan seringkali tidak sesuai target pada laporan anggaran belanja Dinas PSDA dari tahun 2021- 2023 oleh karena itu saya tertarik sekali untuk menyelesaikan permasalahan dan memilih judul ini. Berdasarkan fenomena tersebut maka penelitian ini mengkaji terkait kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

Berdasarkan Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*, yang dilakukan oleh (Rigian & Sari, 2019), (Laoli, 2019), (Batubara & Risna, 2020), (Setia et al., 2019), (Budiarto & Puspitasari, 2020), (Saraswati & Suhartini, 2022), (Novrianti et al., 2022), (Dewi & Hadiprajitno, 2023), (Utami & Haryati, 2023), (Suci & Rohman, 2023), (Auzan et al., 2023), menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Hasil penelitian dari (Arifani et al., 2018) dan (Hakiki, 2022) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel partisipasi terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* yang dilakukan oleh (Rigian & Sari, 2019), (Batubara & Risna, 2020), (Budiarto & Puspitasari, 2020) dan (Auzan et al., 2023) menyimpulkan bahwa partisipasi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Namun hasil penelitian di atas tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novrianti et al., 2022) yang menyatakan bahwa partisipasi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arifani et al., 2018), (Batubara & Risna, 2020), (Budiarto & Puspitasari, 2020), (Hakiki, 2022), (Suci & Rohman, 2023) dan (Dewi & Hadiprajitno, 2023). Terkait pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*, yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Namun temuan tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rigian & Sari, 2019) dan (Auzan et al., 2023) menyatakan bahwa pengawasan tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* yang dilakukan oleh (Utami & Haryati, 2023) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* dengan adanya komitmen organisasi sebagai variabel moderasi akan mengakibatkan variabel akuntabilitas, partisipasi dan pengawasan menjadi lebih kuat. Namun, terdapat penelitian (Saraswati & Suhartini, 2022) yang menjelaskan bahwa komitmen organisasi sebagai variabel moderasi justru tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

Berdasarkan uraian di atas dalam penulisan ini, maka penulis tertarik untuk mengambil judul " **PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI, DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERKONSEP *VALUE FOR MONEY* DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Prov. Sumsel)**"

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas tentang pengaruh akuntabilitas, partisipasi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan. Variabel yang dapat mempengaruhi kinerja anggaran adalah akuntabilitas, partisipasi, pengawasan dan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Variabel tersebut akan diuji apakah terdapat hubungan positif antara keenam variabel tersebut terhadap kinerja anggaran.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan ini apakah:

1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*?
2. Partisipasi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*?
3. Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*?
4. Komitmen organisasi memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*?

5. Komitmen organisasi memoderasi pengaruh partisipasi terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*?
6. Komitmen organisasi memoderasi pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*?

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Penulis membatasi pembahasan permasalahan diatas agar tidak menyimpang dari apa yang dirumuskan sehingga cakupan permasalahan hanya mempengaruhi akuntabilitas, partisipasi, pengawasan dan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan periode 2021-2023.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*
2. Pengaruh partisipasi terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*
3. Pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*
4. Komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*
5. Komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh partisipasi terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*
6. Komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*

1.4.2 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi diharapkan dapat memberikan manfaat berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran berkonsep *value for money* berdasarkan akuntabilitas, partisipasi, pengawasan dan komitmen organisasi.

2. Manfaat praktis

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang berguna bagi peneliti berikutnya mengenai kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi untuk memperluas wawasan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengambil judul dan topik mengenai kinerja anggaran berkonsep *value for money* sehingga dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan pengelolaannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah untuk mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam proposal ini, maka penulisannya diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan latar belakang yang menjelaskan alasan pemilihan judul dan juga menjelaskan topik yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini. Oleh karena itu, dibuatlah suatu sistematika penulisan agar penulisan laporan ini tetap dapat berjalan sesuai dengan alurnya dan tepat sasaran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori tentang penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan kinerja anggaran berkonsep *value for money* berdasarkan akuntabilitas, partisipasi, pengawasan dan komitmen organisasi, serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang akan menguraikan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian, definisi operasional, populasi, dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini dibahas tentang uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.